

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Pengadaan pemerintahan yang efektif dan efisien membutuhkan sarana dan prasarana yang baik dan teratur, untuk mewujudkan hal tersebut pemerintah membuat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara. Undang-Undang tersebut mengartikan bahwasannya Keuangan Negara adalah segala kewajiban dan hak negara yang bisa dinilai dengan mata uang serta semua sesuatu bisa berupa uang maupun barang yang bisa diakuisi milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Selanjutnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara mengartikan tentang Barang Milik Negara (BMN), adalah mengenai pembelian barang yang bisa dibeli melalui dana APBN serta barang pendapatan lainnya yang sah. Kemudian ada Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara telah merubah tata pengglolaan dalam keuangan negara. Barang yang diperoleh APBN meliputi melalui pembelian maupun pembangunan, barang dari perolehan lainnya yang sah meliputi: (1) barang yang diperoleh dari hibah atau sumbangan, (2) barang yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjianI kontrak, (3) barang yang diperoleh sesuaiI dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, (4) barang yang diperoleh berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan tetap.

Barang Milik Negara (BMN) merupakan bagian dari aset milik pemerintah yang bertujuan untuk mensejahterakan rakyatnya. Selain itu, untuk menjamin ketertiban pelaksanaan dan pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan BMN/Daerah dan untuk saat ini telah diganti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara.

Dari penjelasan aturan di atas bisa dikatakan bahwa pengelolaan barang milik negara termasuk kedalam ruang lingkup keuangan negara. Lahirnya Undang-Undang dan peraturan tersebut menuntut adanya pengaturan barang milik negara yang akuntabilitas serta transparansi. Dikarenakan Barang Milik Negara memiliki nilai yang sangat besar dalam neraca Pemerintah Pusat, sehingga hal tersebut menjadi urusan yang tidak bisa dibiarkan oleh pemerintah.

Pemerintah berkewajiban melaporkan dan mempertanggungjawabkan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) yang terdiri dari Laporan Arus Kas, Laporan Operasional, Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan Atas Laporan Keuangan. Yang dimana informasi Barang Milik Negara tercantum dalam Neraca yang terdiri dari pos persediaan, aset tetap, maupun aset-aset lainnya berasal dari Laporan Barang Milik Negara (LBMN).

Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN) diadakan dengan bertujuan untuk mengeluarkan informasi yang dibutuhkan sebagai sebuah alat pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBN dan pengelolaan atau pengaturan barang milik negara yang dikelola oleh suatu departemen akuntansi pengguna barang. SIMAKBMN adalah sistem informasi akuntansi yang berguna untuk melakukan pengelolaan dan penyimpanan administratif terhadap Barang Milik Negara. SIMAKBMN memberikan dampak yang sangat berpengaruh didalam sebuah laporan keuangan, khususnya laporan posisi keuangan (neraca), yang artinya berhubungan dengan aset tetap, aset lainnya, serta rekening persediaan. SIMAKBMN selain berguna untuk pengelolaan dan pengamanan administratif, ia juga berguna sebagai sistem penatausahaan barang milik negara dalam hal pengembangan, pemeliharaan, penghapusan serta rencana pengadaan. Selain pertanggungjawaban, SIMAK-BMN haruslah bersifat transparan, hasil laporan posisi keuangan yang dihasilkan SIMAK-BMN harus terbuka kepada pihak yang membutuhkan agar dapat mengambil keputusan yang tepat untuk langkah kedepannya.

Aplikasi ini sudah digunakan pada semua instansi pemerintah yang ada di Indonesia. SIMAK-BMN ini adalah salah satu aplikasi dari Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yang merupakan prosedur yang saling berhubungan untuk mengelola dokumen yang menghasilkan informasi penyusunan neraca dan laporan Barang Milik Negara serta laporan lainnya sesuai ketentuan yang berlaku. Data transaksi yang ada di BMN adalah data yang berbentuk sebuah dokumen seperti jurnal perubahan, penghapusan barang milik negara serta jurnal transaksi perolehan lalu dikirimkan melalui media arsip data komputer (ADK) setiap satu bulan sekali oleh petugas unit akuntansi kuasa pengguna barang (UAKPB) lalu diberikan kepada petugas unit akuntansi kuasa pengguna anggaran (UAKPA) di tingkat satuan kerja.

Kemudian implementasi SIMAK-BMN ini sangat diharuskan adanya ketelitian dengan persiapan yang bagus serta tertata, terkait dengan sistem informasi, sumber daya manusia, infrastruktur lalu atasan yang kompeten agar implementasi SIMAK-BMN bisa berhasil dan menghasilkan laporan keuangan yang akuntabel dan transparan.

Kementerian Agama Kabupaten Bandung telah menerapkan aplikasi SIMAK-BMN sesuai dengan peraturan yang berlaku. Setiap tahunnya, Kementerian Agama Kabupaten Bandung mendapatkan dana dari APBN untuk melakukan pengelolaan aset negara, oleh karena itu setiap tahunnya harus memberi laporan barang milik negara dalam bentuk neraca dan menghasilkan laporan keuangan.

Meskipun sudah lama menggunakan SIMAK-BMN, namun masih terdapat berbagai macam masalah. Pada tanggal 25 Maret 2021 peneliti melakukan observasi dan wawancara ke Kementerian Agama Kabupaten Bandung, berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan Dikdik selaku operator SIMAK-BMN, tentang permasalahan yang sering terjadi di aplikasi SIMAK-BMN menyatakan bahwa :

“Operator sering salah input dikarenakan banyaknya tampilan menu yang harus diisi di SIMAK-BMN, hal tersebut membuat operator sedikit membingungkan menggunakan SIMAK-BMN sehingga laporan yang dihasilkan sering terjadi kesalahan. Selain itu, operator harus sering berkomunikasi dengan operator aplikasi persediaan dan SAIBA, karena jika data output SIMAK-BMN tidak sinkron dengan

kedua aplikasi tersebut maka akan menghasilkan laporan yang tidak sesuai. Dan yang terakhir operator sering salah input kode barang atau aset dikarenakan di SIMAK-BMN menggunakan kode untuk mengklarifikasi suatu barang atau aset yang berdasarkan Undang-Undang sehingga membuat laporan yang tidak akurat.”<sup>1</sup>

Selain permasalahan yang ditimbulkan oleh Sumber Daya Manusia, kesalahan juga sering terjadi pada aplikasinya, beliau menambahkan bahwa:

“Aplikasi sering not responding dikarenakan fasilitas laptop yang ada memiliki spek yang rendah. Selain itu, aplikasi tidak ada notifikasi update, jika aplikasi tidak update maka data tidak bisa terinput sehingga sering mengganggu pekerjaan dan membuat jalannya pekerjaan kurang efektif.”<sup>2</sup>

Selain masalah yang sudah disebutkan diatas, Harun menambahkan bahwa:

“Masalah yang paling rumit menggunakan SIMAK-BMN adalah ketika barang atau aset nya hilang, barang atau aset tersebut tidak bisa dihapus di SIMAK-BMN karena data yang ada di SIMAK-BMN harus sesuai dengan data yang ada di BPK, barang atau aset yang sudah hilang bisa dihapus namun penghapusan barang tersebut setelah pengecekan yang dilakukan oleh BPK, ini salah satu permasalahan yang menurut saya menyebabkan aplikasi tersebut kurang efektif.”<sup>3</sup>

Selain melakukan wawancara, peneliti juga melakukan observasi. Berdasarkan observasi yang dilakukan oleh peneliti, peneliti menemukan data di aplikasi SIMAK-BMN terkait jumlah total aset yang ada di Kemenag. Total aset yang ditemukan sebanyak 2671 aset atau barang, namun dalam kenyataannya tidak murni sebanyak 2671 dikarenakan ada beberapa aset atau barang yang hilang atau sudah rusak tidak bisa lagi dipakai. Selain itu, dikantor Kemenag Kabupaten Bandung terdapat beberapa aset yang tidak digunakan karena aset tersebut tidak bisa digunakan dalam jangka 12 (dua belas) bulan. Berikut data aset atau barang yang tidak bisa digunakan di Kantor Kemenag Kabupaten Bandung:

**Tabel 1.1**  
**Jumlah Aset yang Tidak Bisa Digunakan**

<b>Kelompok Barang</b>	<b>Kuantitas</b>
------------------------	------------------

<sup>1</sup> 25 Maret 2021, Dikdik

<sup>2</sup> Ibid

<sup>3</sup> 25 Maret 2021, Harun

Mesin Ketik	17
Lemari	19
Rak	2
Meja	50
Kursi	44
Kamera	1
Personal Computer (PC)	11
Laptop	8
Printer	14
<b>Total</b>	<b>166</b>

*Sumber: Kantor Kementerian Agama (Data diolah oleh peneliti)*

Berdasarkan dari tabel dan hasil wawancara di atas, terlihat bahwa pengelola aset di kantor Kemenag Kabupaten Bandung kurang baik dikarenakan sering terjadinya *human error* atau kesalahan operator, selain itu banyak permasalahan yang ada pada aplikasi diantaranya adalah aplikasi tidak ada notifikasi update, fasilitas laptop yang disediakan kemenag memiliki spek yang rendah sehingga sering terjadi not responding serta aplikasi tidak bisa menghapus barang atau aset yang sudah hilang dan rusak sehingga data yang ada di keadaan sebenarnya bisa berbeda dengan data yang di aplikasi, hal ini menandakan bahwa aplikasi SIMAK-BMN kurang efektif. Selain itu, banyak aset atau barang tidak digunakan dengan semestinya yang totalnya berjumlah 166 barang atau aset sehingga pemanfaatan aset yang ada di Kemenag tidak digunakan secara efektif dan efisien.

Berdasarkan hal tersebut, maka penelitian ini akan mengkaji mengenai Efektivitas Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara Dalam Pengelolaan Aset di Kementerian Agama Kabupaten Bandung, lalu dibuatlah judul skripsi yang berjudul **“Efektivitas Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara Dalam Pengelolaan Aset di Kementerian Agama Kabupaten Bandung”**

## **B. Identifikasi Masalah**

Permasalahan yang ada terkait efektivitas Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara di Kementerian Agama Kabupaten Bandung, di antaranya adalah:

1. Operator sering salah input dikarenakan di SIMAK-BMN yang memiliki banyak menu sehingga menghasilkan laporan keuangan yang berbeda.
2. Didalam suatu instansi pemerintah terdapat tiga aplikasi, yaitu persediaan, SIMAK-BMN dan SAIBA. Operator harus melakukan sinkronisasi data yang ada di SIMAK BMN dengan dua aplikasi lainnya agar tidak menghasilkan laporan yang berbeda.
3. Operator sering salah input kode barang dikarenakan di SIMAK-BMN menggunakan kode yang sesuai dengan undang-undang yang berlaku.
4. Dikarenakan fasilitas kurang memadai, laptop yang dimiliki operator memiliki spesifikasi rendah sehingga aplikasi SIMAK-BMN sering mengalami not responding, not responding adalah keadaan dimana system tidak mampu merespon apa yang di perintah sehingga menyebabkan laptop atau komputer tidak dapat dijalankan,
5. Aplikasi tidak dilengkapi notifikasi *update* sehingga jika aplikasi tidak update, data yang sudah di ketikkan ke dalam aplikasi tidak bisa terinput.
6. Banyaknya barang yang hilang, sehingga jumlah barang yang ada di SIMAK-BMN berbeda dengan realitas.
7. Banyak aset yang tidak bisa digunakan dikarenakan barang tersebut tidak memiliki masa pakai selama 12 bulan, yang artinya para pegawai di Kemenag Kabupaten Bandung tidak bisa memaksimalkan sumber daya yang ada sehingga mengakibatkan kinerja yang tidak efektif dan efisien.

### **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang sudah diuraikan, maka peneliti merumuskan masalah sebagai berikut:

Bagaimana efektivitas Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN) di Kementerian Agama Kabupaten Bandung?

### **D. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan, maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN) di Kementerian Agama Kabupaten Bandung.

## **E. Manfaat dan Kegunaan Penelitian**

Berikut kegunaan dan manfaat dari penelitian ini:

1. Kegunaan teoritis, yaitu untuk mengembangkan wawasan serta pengalaman dalam menerapkan teori-teori yang sudah dipelajari oleh peneliti selama masa kuliah di Jurusan Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung. Ilmu yang dikembangkan dalam penelitian ini adalah Ilmu Administrasi Publik, Administrasi Keuangan Negara, Akuntansi Publik dan Efektivitas.
2. Kegunaan praktis, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat dalam pengambilan keputusan dan juga untuk menyumbangkan pemikiran yang bermanfaat terkait masalah tentang Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara.

## **F. Kerangka Pemikiran**

Dalam penelitian ini, kerangka pemikiran terdiri dari tiga konsep yaitu Grand Theory, Middle Theory, dan Operasional Theory. Dimana grand theory yang digunakan yaitu keuangan negara, middle theory menggunakan teori akuntansi sektor publik dan operasional theory menggunakan teori efektivitas.

Keuangan Negara menurut Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan negara pasal 1 adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan mata uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.

Menurut Mardiasmo Akuntansi Sektor Publik dapat dipahami sebagai entitas yang kegiatannya berkaitan dengan upaya memproduksi barang dan jasa publik untuk memenuhi kebutuhan dan hak publik.

Menurut Mahmudi Efektivitas merupakan hubungan antara output dengan tujuan. Semakin besar kontribusi output terhadap pencapaian tujuan, maka semakin efektif organisasi, program, atau kegiatan.

Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Daerah atau yang biasa kita sebut SIMAK-BMN sangat diperlukan oleh setiap instansi karena SIMAK-BMN dapat memudahkan mekanisme pengelolaan aset yang meliputi penyusutan aset,

pendataan aset masuk dan keluar, serta penghapusan aset. Selain itu, teknologi informasi SIMAK-BMN ini dapat menghasilkan informasi yang akurat, lengkap, dan cepat dalam ranke pengelolaan aset. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 Indonesia dibagi menjadi beberapa daerah yang disebut dengan provinsi, daerah - daerah tersebut disebut otonom. Artinya daerah - daerah tersebut menjalankan pemerintahan atau urusan-urusannya sendiri namun mengikuti aturan yang sudah ditetapkan di pusat. Tujuan pemberian otonomi daerah ini adalah agar daerah-daerah tersebut bisa membangun daerah nya sendiri tanpa mengandalkan dari pusat saja, daerah tersebut bisa membangun berdasarkan sumber daya alam yang tersedia berdasarkan daerah tersebut. Selain pembangun dari sumber daya alam, pembangunan lainnya meliputi berbagai aspek kehidupan seperti ekonomi, sosial, budaya, hukum, dan lain-lain.

Berdasarkan hal tersebut menjadikan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara yang terdapat di setiap instansi pemerintah menjadi salah satu kebijakan yang dilaksanakan pemerintah agar dapat bisa mengelola aset dengan baik dan terstruktur secara mandiri. Ketentuan hukum dari Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara yaitu UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Peraturan Presiden No 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan BMN/D.

Setiap instansi pemerintah didalam nya memiliki sebuah tujuan, untuk mencapai tujuan tersebut dipastikan harus dilakukan dengan secara efektif agar tujuan tersebut cepat tercapai dengan baik. Agar sistem informasi menjadi efektif, menurut DeLone dan Mclean dalam (Mustakini 2007:129) dimensi keberhasilan dari sistem informasi yaitu:

1. Kualitas Informasi

Kualitas sistem berhubungan dengan kualitas dari keluaran sistem informasi.

Dimensi ini berhubungan dengan isu-isu, yaitu:

- a. Relevan
- b. Ketepatan waktu
- c. Akurasi informasi yang dihasilkan dari oleh sistem informasi.

2. Kepuasan Pengguna

Kepuasan pengguna dihubungkan dengan respon penerima dari penggunaan keluaran sistem informasi, dibagi menjadi dua fokus yaitu:

- a. Kualitas Software
- b. Kualitas Hardware

3. Penggunaan



Penggunaan didefinisikan sebagai konsumsi penerima dari keluaran sistem informasi, dimensi ini hanya ada satu sub dimensi yaitu:

- a. Frekuensi Penggunaan
4. Dampak Individual

Dampak individual didefinisikan sebagai efek dari informasi terhadap perilaku penerimanya. Variabel yang digunakan untuk menganalisisnya adalah:

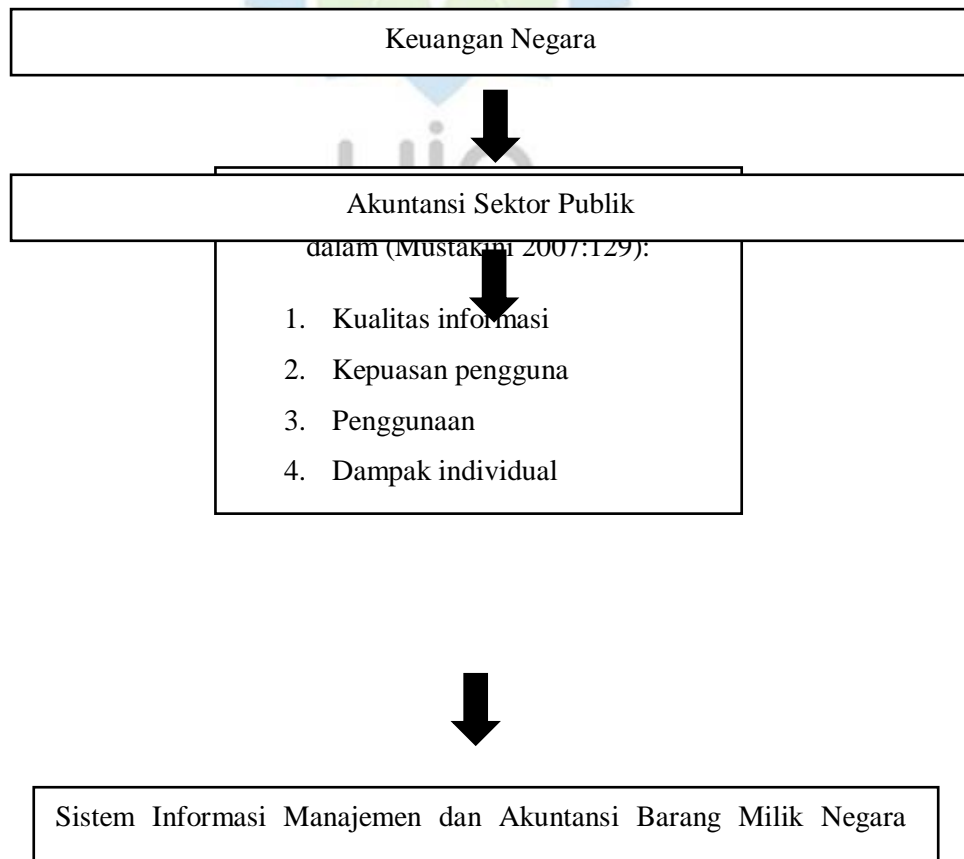
- a. Kecepatan dari identifikasi masalah
- b. Kecepatan dari pengambilan keputusan
- c. Perpanjangan dari analisis

5. Dampak Organisasional

Dampak organisasional didefinisikan sebagai efek dari informasi terhadap kinerja organisasional. Variabel dari dimensi ini adalah:

- a. Pengambilan keputusan
- b. Kinerja organisasional

Berdasarkan kerangka pemikiran tersebut, maka kerangka pemikiran dapat digambarkan sebagai berikut:





**uin**  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SUNAN GUNUNG DJATI  
BANDUNG